

**KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS APARATUR DESA
DI KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

JURNAL LAPORAN AKHIR



oleh

OKKY IRWANTO AJANG

NPP. 28.0888

Program Studi: Manajemen Sumber Daya Aparatur

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Jatinangor, 2021

KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS APARATUR DESA DI KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Okky Irwanto Ajang¹, Eko Budi Santoso², Megandaru Widhi Kawuryan³

Institut Pemerintahan Dalam Negeri^{1,2,3}

Email : AjangOkky@gmail.com¹, budi_santoso@ipdn.ac.id²,
megandaru@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Desa merupakan ujung tanduk dari Pemerintahan di Indonesia, sehingga, diperlukannya aparatur desa yang berkualitas dalam menjalankannya dan Dinas atau Badan yang berperan ditingkat daerah dalam melaksanakan tugas pemberdayaan tersebut tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka dari itu penulis mengambil judul **“KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS APARATUR DESA DI KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.”** Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi pelaksanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kualitas aparatur desa di Kabupaten Lamandau, dengan menggunakan teori kinerja dari T.R. Mitchell dalam Serdamayanti, (2009). Mengetahui faktor-faktor penghambat kinerja DPMD, dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan kinerja DPMD. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi adapun dalam menganalisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih belum optimal dalam meningkatkan kualitas aparatur desa di Kabupaten Lamandau hal tersebut dilihat dari lima dimensi kinerja menurut T.R. Mitchell dimana tiga dimensi kinerjanya menunjukkan performa masih belum optimal yaitu di dimensi Kualitas kerja, Kemampuan aparatur dan Disiplin kerja dan dua dimensi sudah cukup baik yaitu di dimensi Inisiatid dan Komunikasi. Upaya atau strategi yang dilakukan DPMD Kabupaten Lamandau untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu meningkatkan kerja sama dengan pihak Kecamatan untuk melakukan crosscheck aparatur desa, meningkatkan kualitas pendidikan SDM DPMD, pengoptimalan dan penambahan sarana dan prasarana dan melakukan pembinaan khusus terkait masalah pelanggaran politik.

Kata Kunci : Kinerja, Peningkatan Kualitas Aparatur, Pemerintah Desa

ABSTRACT

The village is the end of the horns of the Government in Indonesia, so, the need for qualified village officials in carrying it out and the Service or Agency that plays a role at the regional level in carrying out these empowerment tasks is the Community and Village Empowerment Service, therefore the author takes the title "**THE PERFORMANCE OF THE COMMUNITY AND VILLAGE EMPOWERMENT OFFICE IN IMPROVING THE QUALITY OF VILLAGE OFFICIALS IN LAMANDAU REGENCY, CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE**". This study aims to obtain data and information on the implementation of the performance of the Community and Village Empowerment Service in improving the quality of village officials in Lamandau Regency, using the performance theory of T.R. Mitchell in Serdamayanti, (2009). Knowing the factors inhibiting DPMD performance, and efforts to overcome obstacles in improving DPMD performance. This research is a qualitative research with a descriptive method with an inductive approach, the data collection techniques used in this research are observation, interview and documentation techniques, while in analyzing the data, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the performance of the Community and Village Empowerment Service was still not optimal in improving the quality of village officials in Lamandau Regency. This was seen from the five dimensions of performance according to T.R. Mitchell where the three dimensions of performance show that the performance is still not optimal, namely in the dimensions of quality of work, ability of personnel and work discipline and two dimensions are good enough, namely in the dimensions of initiative and communication. Efforts or strategies carried out by DPMD Lamandau Regency to overcome these obstacles, namely increasing cooperation with the District to crosscheck village officials, improve the quality of DPMD HR education, optimize and add facilities and infrastructure and provide special guidance related to the problem of political violations.

Keywords: Performance, Improving the Quality of Apparatus, Village Government

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum suatu pemerintahan memiliki 4 (empat) fungsi yaitu, pelayanan, pengaturan, pembangunan dan pemberdayaan. Fungsi tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan dan optimal untuk mencapai tujuan dari pemerintahan. Salah satunya adalah fungsi pembangunan, dimana fungsi tersebut mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

UU No.23 Tahun 2014 adalah pedoman dalam pelaksanaan proses otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah berwenang sebagai pelaksana 4 (empat) fungsi pemerintahan di daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Kemudian dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa tidak dijelaskan secara detail, namun seiring berjalannya waktu desa kembali dijelaskan secara eksplisit pada UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan umum tersebut desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaannya, desa yang melambangkan media pemerintah pusat sekaligus media pemerintah daerah.

Namun dalam hal kenyataannya kita dapat menilai bahwa hal tersebut belum berjalan seperti yang telah direncanakan. Seperti yang tercatat dalam Rekapitulasi Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018-2019 disebutkan bahwa di Kabupaten Lamandau terdapat 1 desa sangat tertinggal, 22 desa tertinggal, 41 desa berkembang, 20 desa maju dan 1 desa mandiri. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak desa yang belum berkembang.

Hasil penelitian Budianto Rahmat dan Febrina Rury (2020) tentang Akuntabilitas Keuangan Desa dimana dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pertanggung jawaban keuangan telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada

di UU No. 6 Tahun 2014 namun masih terdapat kendala yang harus diperbaiki salah satunya adalah dalam pemahaman aparat desanya.

Sampai pada saat ini Desa masih belum menunjukkan tanda-tanda perkembangan, masyarakat desa masih tertinggal hal ini disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia yang ada di desa terutama aparaturnya. Berdasarkan data yang didapat dari Berita di Media Indonesia menyebutkan dari 74.957 desa di seluruh Indonesia, sebanyak 60% kepala desa hanya lulusan SMP. Bahkan ada 15% yang tanpa pendidikan formal. Sisanya sebanyak 25% lulusan SMA dan Perguruan tinggi. Sumber (<https://mediaindonesia.com/nusantara/259288/lemahnya-sdm-perangkat-desa-sebabkan-penyimpangan>). Hal tersebut berbanding lurus dengan data yang didapat dalam LAKIP DPMD Tahun 2020 yang menyebutkan masih rendahnya kualitas aparatur penyelenggara pemerintah desa di Kabupaten Lamandau.

Sementara itu apabila dilihat dari instansi-instansi Pemerintah Daerah yang dalam landasan legalistiknya baik dari segi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerahnya yang menghasilkan program kerja yang berkaitan atau berhubungan dengan Desa, serta dilihat dari fungsinya yang berhubungan atau yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Desa hanyalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga menghadapi hal tersebut kita tidak dapat hanya menantikan kinerja aparaturannya membaik dengan sendirinya, namun diperlukan usaha nyata dari instansi-instansi atau Lembaga-Lembaga pemerintah untuk menjadi penggerak dalam gerakan meningkatkan kualitas Aparatur Desanya.

Pemerintahan desa yang baik merupakan sesuatu yang diinginkan oleh setiap masyarakat tentu, dalam mencapainya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas terutama Aparatur Desanya sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan penjelasan tadi maka, sangat diperlukan peran dari Pemerintah Daerah terutama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, desa wajib memberikan perhatian lebih dalam masalah kinerja aparaturnya karena mereka merupakan aktor penggeraknya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis

ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kualitas aparatur desa.

1.2. Permasalahan

Adapun beberapa permasalahan berkaitan dengan Kinerja DPMD dalam meningkatkan kualitas aparatur desa di Kabupaten Lamandau salah satunya adalah SDM aparaturnya yang belum memenuhi standar dimana berdasarkan data Laki DPMD terdapat 41 orang pegawai dimana 23 orang berpendidikan SLTA dan baru 4 orang yang memiliki pendidikan Pasca Sarjana, data tersebut tentu akan mempengaruhi performa dari DPMD dalam melaksanakan tugasnya yaitu meningkatkan kualitas aparatur desa,

Penggantian aparatur desa juga merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh DPMD dimana para aparatur desa yang telah dilatih dan didik diganti akibat politik yang ada di desa sehingga aparatur desa yang seharusnya merupakan aset desa menjadi menghilang.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks evaluasi kinerja maupun konteks pemberdayaan kualitas aparatur. Penelitian Rahmadan, Syahrul berjudul Analisis Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis (Rahmadan, Syahrul 2010), menemukan bahwa masih rendahnya kualitas aparatur desa disebabkan karena ketidak tahuan aparatur desa terhadap tugas dan fungsi mereka. Selain itu, pada penelitian Muslim Nur'aini dan Irwan Nasution yang berjudul Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan (Muslim Nur'aini dan Irwan Nasution 2014) menemukan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh aparat desa yaitu kerjasama antara aparatur desa masih merupakan masalah dimana antara aparat desa belum bisa terjalin kerja sama yang baik sehingga perlunya ada koordinasi dan bantuan dari Dinas terkait. Penelitian Zilfaroni dan Juli Ronaldi yang berjudul Pengaruh Disiplin dan Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja

Pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasaya (Zilfaroni dan Juli Ronaldi 2019) mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan Kinerja DPMD dalam meningkatkan kualitas aparatur desa adalah disiplin dan motivasi pegawai dimana dengan mewujudkan disiplin maka akan memberikan motivasi yang dibutuhkan oleh aparatur DPMD. Selain itu Penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi, Edy dalam Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melalui Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, dimana dalam penelitaian nya terswebut salah satu faktor penyebab rendahnya kinerja DPMD adalah keterbatasan APBD yang ada di daerah sehingga menyebabkan terkendalanya beberapa kegiatan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dimana Penulis melakukan evaluasi kinerja yang DPMD lakukan dalam meningkatkan kualitas aparatur desa di Kabupaten Lamandau, menggunakan indikator maupun Dimensi yang berbeda dibandingkan dengan Penelitian sebelumnya yakni menggunakan Pandangan T.R Mitchell dalam Serdamayanti (2009:51) yang mengatakan kinerja dilihat melalui lima dimensi yaitu, Quality of work, Promptness, Initiative, Capability, Communication.

1.5. Tujuan

Tujuan magang secara umum adalah untuk mendeskripsikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas Aparatur Desa di Kabupaten Lamandau, sedangkan secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas Aparatur Desa di Kabupaten Lamandau.

2. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas Aparatur Desa di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah.
3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan-hambatan guna meningkatkan kualitas aparatur desa di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan fokus yang diamati dan dikaji dengan pendekatan induktif. Hal ini bertujuan untuk memahami, sehingga dapat mengembangkan pemikiran dan pengetahuan dalam mencari apa yang sebenarnya dilapangan.

Dalam melaksanakan penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa Teknik Triangulasi Sumber yaitu meliputi Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Penulis melakukan wawancara dengan metode semi terstruktur terhadap 12 Informan dimana penulis merasa dengan menggunakan metode ini Penulis dapat melakukan wawancara dengan tidak kaku atau formal dan dapat disesuaikan dengan kondisi dilapangan yang dinamis. Dimana para Informan tersebut terdiri dari Kepala Dinas PMD, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kepala Seksi Penataan Desa, Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa, Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan & Aset Desa, Kepala Desa (Maju, Berkembang dan Tertinggal), dan Masyarakat Desa (Maju, Berkembang dan Tertinggal). Adapun untuk teknik analisis datanya menggunakan teori Analisis Data Kualitatif menurut Simangunsong (2016:192) yaitu, Data Reduction, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verification.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Desa

Kinerja Aparatur sangat penting untuk suatu organisasi perangkat daerah, baik bagi pribadi ataupun orang lain. Menurut Moehriyono (2014:95) pengertian “kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi”. Agar tercapai suatu kepastian objektif dalam mengukur hasil kinerja pemerintah dalam penelitian ini maka parameter yang digunakan penulis yaitu indikator penilaian kinerja organisasi menurut T.R. Mitchell dalam Serdamayanti (2009:51). Dikelompokkan ke dalam lima kategori yaitu; Quality of Work, Promptness, Initiative, Capability, dan Communication.

Berikut merupakan tabel hasil kesimpulan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kualitas aparatur desa, menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi pada mekanisme Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kualitas Aparatur Desa di Kabupaten Lamandau.

Tabel 3. 1 Ringkasan Analisis dan Kesimpulan beberapa Dimensi dalam Konsep Kinerja Dinas PMD

No	Dimensi	Ringkasan Sub Kesimpulan pada Dimensi	Analisis dan Kesimpulan
1	Kualitas	Kinerja Dinas PMD Masih belum maksimal hal ini dikarenakan Dinas PMD menemukan beberapa hambatan baik dari segi peraturan yang berubah sampai aparatur desa yang dirubah	Kinerja DPMD dalam meningkatkan kualitas aparatur desa masih belum maksimal dimana masih masih ditemukan beberapa hambatan dalam tiap-tiap dimensi.
2	Ketepatan Waktu	Ketepatan waktu Dinas PMD dalam pelaksanaan tugas masih belum optimal dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas PMD salah satunya sarana prasana yang belum memadai serta kondisi jalan yang rusak	
3	Inisiatif	Inisiatif pada Dinas PMD sudah cukup baik dalam bidang penyampaian ide/gagasan namun masih belum optimal dari segi upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Dinas PMD	
4	Kemampuan	Dalam dimensi inisiatif DPMD masih belum optimal dimana target yang ditentukan masih rendah selain itu DPMD juga menemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan sinyal di beberapa desa serta aparatur desa yang diganti	
5	Komunikasi	Berdasarkan Dimensi komunikasi yang ada di DPMD sudah memiliki komunikasi yang cukup baik di bidang Internal namun untuk bidang Eksternal dan relasi/kerja sama perlu lebih ditingkatkan dalam koordinasi antar Instansi/Badan	

Sumber: Analisis Penulis

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kualitas aparatur desa masih belum optimal dikarenakan masih adanya beberapa hambatan dalam tiap-tiap dimensi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.2 Kondisi Yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Desa

Dalam proses untuk mencapai tujuan suatu organisasi tentunya akan menemukan berbagai kendala dan permasalahan. Demikian pula halnya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka penulis menganalisa beberapa kondisi penghambat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugasnya.

3.2.1 Kondisi Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Muriadi, M.Si sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau pada hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kondisi yang menghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

a. Penggantian Aparatur Desa Yang Merupakan Aset Desa

Seringnya terjadinya perombakan perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa merupakan salah satu hambatan yang paling sering di alami Oleh Dinas PMD. Hal ini sering terjadi karena masih adanya unsur politik didalam desa yang terjadi antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa atau Kepala Desa dengan Badan Pengawasan Desa.

Hal ini tentu menjadi kendala bagi Dinas PMD dimana dengan seringnya terjadinya perombakan perangkat desa tersebut tentu akan mempengaruhi kualitas dari aparatur desanya itu sendiri dimana usaha yang selama ini dilakukan oleh Dinas PMD seperti pelatihan-pelatiha maupun Bimtek menjadi

sia-sia dikarenakan hilangnya aparatur desa yang sebenarnya merupakan aset desa itu sendiri.

Selain itu peranan kecamatan yang sangat penting dalam pemberian rekomendasi pemberhentian perangkat desa turut berperan besar. Namun, masih kurangnya proses crosscheck yang seharusnya dilakukan oleh pihak kecamatan serta tidak dilibatkannya pihak Dinas PMD dalam pengambilan keputusan tersebut menyebabkan terjadinya proses perombakan aparatur desa tersebut.

Berdasarkan hal ini penulis berkesimpulan bahwa salah satu penyebab penghambat Dinas PMD dalam peningkatan kualitas aparatur adalah sering terjadinya penggantian aparatur desa yang sebenarnya merupakan aset desa. Sehingga hal ini harus menjadi acuan untuk kedepannya bagi Dinas PMD untuk melakukan koordinasi baik dengan pihak kecamatan, maupun pemerintah desa terkait masalah tersebut.

b. Kurangnya Kualitas Pendidikan Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber daya yang berkualitas akan menghasilkan suatu kegiatan yang berkualitas, begitupun sebaliknya sumber daya yang rendah akan mempengaruhi hasil kerja, serta keberhasilan dari suatu kegiatan. Dari pengamatan penulis pada saat penelitian sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih kurang, terlihat dari jumlah personil yang berjumlah 41 orang personil terdiri dari 28 PNS dan 13 orang Tenaga Kontrak, hanya 18 orang yang telah melaksanakan pendidikan sarjana (D3, S1 dan S2), dan yang lainnya mempunyai ijazah sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Alex Frandes Hutabean, S.Hut sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kabupaten Lamandau pada hari Kamis, tanggal 7/01/2021 pukul 09.30 WIB bertempat di ruangan Bidang Pemerintahan Desa, beliau mengatakan:

Kalau berbicara masalah SDM ya SDM saya rasa ya sudah memenuhi standar artinya mampu bekerja tetapi yang masih dikeluhkan kekurangan personil ya, kekurangan jumlah pegawai saya rasa yang kurang, kita membina 85 desa dengan kondisi sekarang dimana ada tiga kasi artinya cukup besar kami wilayah

yang harus kami masuki, kekurangan personil yang pastinya kalau SDM yang ada sekarang untuk tingkat pendidikan dan anunya saya rasa masih mencukupi tapi kalau personilnya saja kurangnya terutama di tenaga ahli yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi apalagi di bidang keuangan berbicara masalah agenda satu tahun, satu tahun ini berjalan terus artinya ditambah lagi aplikasi- aplikasi sehingga menuntut perhatian dan ini menjadi tuntutan dari kementerian KPPN baik vertikal maupun horizontal, kementerian lainnya jadi, disitu itu cukup kewalahan artinya perlu pencukupan penambahan personil pegawai

Berdasarkan wawancara tersebut dapat terlihat bahwa jumlah personil di Dinas PMD masih kurang selain itu keperluan untuk tenaga ahli seperti admin Aplikasi Siskeudes, Prodeskel dan sebagainya masih kurang dikarenakan hanya terdapat satu tenaga ahlinya yaitu Bapak Alex Frandes Hutahean, S.Hut. Oleh sebab itu Dinas PMD Kabupaten Lamandau yang berkoordinasi dengan Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah sering mengadakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi para anggota Dinas PMD yang ada di daerah, agar bertujuan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMD dalam menjalankan tugasnya selain peningkatan dari mutu kualitasnya, Dinas PMD juga perlu melakukan penambahan tenaga SDMnya.

c. Menambahkan Sarana dan Prasana Dalam Menunjang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Aparatur Desa

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Muriadi, M.Si sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau pada hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, beliau mengatakan :

Cukup saja walaupun sebenarnya masih kurang, kurang dalam artinya tu kan ya nama nya kita kabupaten pemekaran tapi kan cukup saja ya cukup memadai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Alex Frandes Hutahean, S.Hut sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kabupaten Lamandau pada hari Kamis, tanggal 7/01/2021 pukul 09.30 WIB bertempat di ruangang Bidang Pemerintahan Desa, beliau mengatakan:

Masih belum maksimal karena terkadang sarana kita seperti tempat pertemuan kemudian sarana mobilitas kita cukup masih dirasa kurang.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan suatu organisasi tidak akan berjalan efektif tanpa didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Namun, selain penambahan dari segi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparat juga harus meningkatkan besaran tunjangan kerja serta koordinasi dengan pihak terkait lainnya guna mencapai kinerja yang maksimal.

d. Pengaruh dari Politik dan Budaya di Desa

Politik dan budaya merupakan salah satu sumber hambatan eksternal yang dialami oleh Dinas PMD, hal ini dikarenakan dalam menjalankan pemerintahan selalu dipengaruhi unsur politik dan budaya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Muriadi, M.Si sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau pada hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, beliau mengatakan:

Bisa terjadi tidak juga yang terlalu sering karena begini kadang-kadang misal ada pilkades ada tiga calon yang kebetulan salah satu calon ini menang dua calon ini kalah tetapi ketika rekrutmen BPD dua calon ini mencalonkan diri sebagai ketua BPD nah ini yang jadi kadang-kadang kita menjadi kesulitan karena yang ketua BPD merasa sebagai kepala desa padahal pemerintah desa itu harus selaras antara BPD dan kepala desa itu sejalan ya makanya politik-politik di desa itu seperti itu tadi ketika jadi apabila tidak ditangani secara intens juga dari kecamatan kadang-kadang kebijakan itu juga sulit karena bagaimanapun dari pihak BPD terlibat dalam penyusunan APBDes menampung aspirasi masyarakat melakukan pengawasan apalagi konteks terkait dengan penyusunan segala peraturan desa dengan sebagainya kan ada keterlibatan BPD di situ ya itu aja kendala tapi itu tidak banyak terjadi kasusnya hanya sedemikian saja kalau yang lain baik-baik saja jadi kalau memang pasti ada tapi Cuma yang terjadi seperti yang saya ceritakan tadi kalau kepentingan yang menyangkut hal lain-lain sih tidak ada saja.

Sedangkan untuk kondisi budaya sangat, sangat berpengaruh budaya itukan sangat berpengaruh karena kalau kita di Lamandau ini kan masyarakatnya memang sudah campur sih sebenarnya tapi bagi desa yang sudah heterogen itu mungkin lebih baik maksudnya lebih baik dari masyarakat desa yang homogen homogen itu misalnya kaya orang Landau Kantu orang Landau Kantu semua tidak ada orang lain kaya orang Jawa, Madura, Flores, bahkan di daerah trans itu kan yang sebenarnya mayoritas nya orang jawa tapi kepala desa nya malah

orang flores nah itukan sudah menerima keterbukaan, ya selain itu biasanya daerah trans lebih cepat karena mereka terbiasa di daerah jawa .

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh eksternal juga turut mempengaruhi hambatan pelaksanaan kinerja Dinas PMD dalam meningkatkan kualitas aparatur salah satunya yang disebabkan oleh pengaruh Politik dan Budaya, dimana disini Dinas PMD dituntut untuk menangani secara intens bersama pihak Kecamatan baik dari masalah politik maupun budaya.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis selama dilapangan penulis berhasil menemukan permasalahan utama penyebab rendahnya kualitas aparatur desa di Kabupaten Lamandau. Penyebab utamanya yaitu karena pengaruh politik yang ada di desa dimana pengaruh politik antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa atau Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal ini terjadi dimana ketika ada pertentangan politik dimana pihak yang berkuasa sering mengubah anggota yang bersangkutan atau ada unsur Nepotisme dimana pihak yang berkuasa memberikan jabatan kepada keluarganya sehingga menyebabkan pelatihan yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi tidak berguna karena harus melatih dari awal lagi. Hal ini menjadi temuan utama dikarenakan dalam penelitian terdahulu belum ada pembahasan mengenai masalah tersebut.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara serta hasil analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Desa di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau masih belum optimal, dari lima dimensi/kategori kinerja menurut T.R. Mitchell tiga dimensi/kategori menunjukkan performa yang belum baik,

sementara dua dimensi/kategori yang cukup baik rincian performa pada lima dimensi/kategori tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas kerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau dari sisi hasil kerja belum mencapai tujuan organisasi.
 - b. Kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas sudah baik tapi terkendala penggantian aparatur dari desa sehingga usaha yang dilakukan menjadi sia-sia.
 - c. Disiplin kerja aparatur Satuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau yang belum optimal, hal ini dikarenakan cakupan luas wilayah yang besar dan medan yang rusak..
 - d. Inisiatif anggota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau sudah baik namun belum maksimal dikarenakan tindakan atau pemecahan masalah yang ditawarkan tidak bisa menjadi pemecahan masalah secara permanen.
 - e. Komunikasi Intern dan Ekstern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau sudah berjalan dengan baik namun masih diperlukan peningkatan salah satunya dengan diadakannya pertemuan rutin untuk meningkatkan relasi antar Dinas/Badan terkait..
2. Terdapat kondisi penghambat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Lamandau dalam meningkatkan kualitas aparatur desa.
- a. Kondisi yang menghambat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Lamandau dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum adalah :
 - 1) Penggantian aparatur desa yang merupakan aset desa
 - 2) Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 3) Kurangnya sarana prasarana perlengkapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau dalam peningkatan kualitas aparatur desa.
 - 4) Pengaruh eksternal politik dan budaya .

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala Dinas PMD dan seluruh Aparat DPMD yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan magang sekaligus melakukan penelitian selama satu bulan, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Kinerja*. Bandung: Alfabeta

Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi offset

Hamzah dan Nina. 2014. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara

Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

L. Gaol, Jimmy. 2014. *A to Z Human Capital – Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo

Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama

Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda

Mocheriono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Nazir, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Saleh, Choirul dkk. 2013. *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur*. Malang: Universitas Brawijaya Press

Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju

_____. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama

_____ dan Syarifudin Hidayat. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Simangunsong, Fernandez. 2016 *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta

Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wibowo. 2014. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wirawan. 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat

Yusuf, A.Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

C. JURNAL

Budianto, Rahmat dan Rury Febrina 2020. *Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Desa* . Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja

D. SUMBER LAINNYA

LAKIP DPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2020

SAKIP DPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023

Rekapitulasi IDM (Indeks Desa Membangun) Tahun 2019